



ESELON II

PENGUKURAN
KINERJA
TRIWULAN II

TA. 2022

BPKPD

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN SOPPENG

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON II
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
TRIWULAN II TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	CARA PENGUKURAN INDIKATOR SASARAN	TRIWULAN II		KETERANGAN	PROGRAM	PAGU	TRIWULAN II		KETERANGAN
					REALISASI FISIK	%				REALISASI KEUANGAN	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah	Indeks Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (Dimensi 1)	8.52	Indeks D1 = Skor Rata-Rata x Bobot (15)	10.88	127.70		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	119,315,200,598	42,437,944,746		35.57
		Indeks Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD (Dimensi 2)	20	Indeks D2 = Skor Rata-Rata x Bobot (20)	20	100	Estimasi Nilai 2022					
		Indeks Transparansi pengelolaan keuangan daerah (Dimensi 3)	13.92	Indeks D3 = Skor Rata-Rata x Bobot (15)	14.72	105.75						
		Penyerapan anggaran (Dimensi 4)	15	Indeks D4 = Skor Rata-Rata x Bobot (20)	0	0.00		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	706,380,000	212,284,380	30.05	
		Indeks Kondisi Keuangan Daerah (Dimensi 5)	3.69	Indeks D5 = Skor IKK x Bobot (15)	0	0.00						
		Indeks Opini BPK terhadap LKPD (Dimensi 6)	15	Indeks D6 = Skor x Bobot (15)	0	0						
2	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	1%	Jumlah Realisasi PAD(n) - Jumlah Realisasi PAD(n-1) / Jumlah Realisasi PAD (n-1) x 100%	-55%	-55	Realisasi PAD Triwulan I 2022 Rp.29.619.614.484,8	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1,141,027,743	371,159,533		32.53
		Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi daerah	BAIK	Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pajak dan Retribusi Daerah	BAIK	100%	Nilai 2021					
3	Meningkatnya Kapasitas Aparatur dan Kualitas Layanan Penyelenggaraan Urusan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng	Persentase Aparatur yang mendapatkan Nilai SKP Berpredikat BAIK	100%	Jumlah Aparatur yang Mendapatkan Nilai SKP Berpredikat BAIK/ Jumlah Aparatur pada BPKPD x 100%	100%	100	Nilai 2021	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22,367,434,541	8,614,937,225	38.52	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng	79-81	Survey Kepuasan Masyarakat/OPD terhadap Layanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng	84.44	106.8861	Nilai 2021					

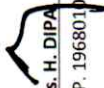
Faktor Pendorong : Adanya target kinerja yang terukur dan logis, adanya aturan yang mengikat serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, Adanya nilai pemanfaatan atas capain kinerja tahun lalu untuk menjadi pendorong pencapaian target pada tahun berikutnya

Uraian Permasalahan : Aplikasi SIPD yang belum terintegrasi secara menyeluruh dengan sistem penatausahaan keuangan dan laporan keuangan, Kurangnya SDM yang berlatar belakang keuangan dan akuntansi, pengukuran IPKD Tahun 2022 belum dilakukan oleh Pemerintah Provinsi sehingga nilai yang diperoleh menggunakan data perhitungan manual dan data IPKD tahun 2020, 2021 dan data Anggaran Pokok Tahun 2022

Rencana Tindak Lanjut : Mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang dicapai dan mengoptimalkan upaya dalam mencapai target kinerja yang belum terpenuhi, serta mengkaji hal-hal yang menjadi kendala dalam pemenuhan target tersebut

Watansoppeng, Juli 2022

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. SOPPENG



Drs. H. DIPA M.Si
NIP. 19680102 199603 1 005



ESELON III

PENGUKURAN
KINERJA
TRIWULAN II

TA. 2022

BPKPD

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN SOPPENG

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON III
SEKRETARIS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
TRIWULAN II TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	CARA PENGUKURAN INDIKATOR KEGIATAN	TRIWULAN II		KET	KEGIATAN	PAGU	TRIWULAN II		KET
					REALISASI FISIK	%				REALISASI KEUANGAN	%	
1	2	3	4	5			8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Kapasitas Aparatur dan Kualitas Layanan Penyelenggaraan Urusan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng	Persentase Keterpenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	Jumlah dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan dibagi jumlah keseluruhan dikali 100%	100%	100.00		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50,130,000	11,630,400	23.20	
		Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan	100%	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan yang diselesaikan dibagi jumlah keseluruhan dikali 100%	100%	100.00		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13,539,379,956	4,487,393,243	33.14	
		Persentase Keterpenuhan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian yang diselesaikan dibagi jumlah keseluruhan dikali 100%	100%	100.00		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	41,050,000	9,801,000	23.88	
		Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum (%)	100%	Jumlah Administrasi Umum yang diselesaikan dibagi jumlah keseluruhan dikali 100%	100%	100.00		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,111,069,970	540,840,319	48.68	
		Persentase Keterpenuhan Proses Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	Jumlah Proses Pengadaan BMD yang diselesaikan dibagi jumlah keseluruhan dikali 100%	100%	-		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	408,277,000	371,783,000	91.06	
		Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Jumlah Jasa Penunjang Urusan yang diselesaikan dibagi jumlah keseluruhan dikali 100%	100%	100.00		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7,070,053,965	3,126,733,413	44.23	
		Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara Baik (%)	100%	Jumlah BMD yang terpelihara dengan baik dibagi jumlah BMD yang memerlukan pemeliharaan dikali 100%	100%	100.00		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	198,219,050	66,755,850	33.68	

Uraian Permasalahan : beberapa Kegiatan dan Sub Kegiatan belum terealisasi maksimal karena menunggu perubahan anggaran

Rencana Tindak Lanjut : Memaksimalkan perencanaan anggaran dengan mempertimbangkan waktu yang tersedia

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. SOPPENG


Drs. H. DIPA, M.Si
NIP. 19680102 199403 1 005

Watansoppeng, Juli 2022
SEKRETARIS,


LIES UTINI, S.E., M.Si
NIP : 19690825 199312 2 002

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON III
 KEPALA BIDANG ANGGARAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
 TRIWULAN II TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	CARA PENGUKURAN INDIKATOR KEGIATAN	TRIWULAN II		KET	KEGIATAN	PAGU	TRIWULAN II		KET
					REALISASI FISIK	%				REALISASI KEUANGAN	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah	Persentase Keterpenuhan Dokumen Penganggaran Daerah Tepat Waktu	100	Jumlah Dokumen Penganggaran yang telah diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah Dokumen Penganggaran yang harus diselesaikan dikali 100%	100	100.00		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1,177,605,000	379,909,600	32.26	
		Persentase penyaluran Dana Keuangan yang Sesuai Kewenangan, Tepat Waktu dan Tepat Jumlah	100	Jumlah dokumen Dana Keuangan yang telah tersalurkan Sesuai Kewenangan dibagi Jumlah yang seharusnya tersalurkan dikali 100%	100	100.00		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	119,325,965,829	41,949,813,846	35.16	
Faktor Pendorong : Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dalam menyusun rencana anggaran daerah tepat waktu												
Uraian Permasalahan : Dana Alokasi Desa, dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi pencairan berdasarkan permohonan dari desa masing-masing. Adanya perubahan pagu anggaran pada tahapan Pergeseran Anggaran Mendahului Perubahan ke III Tahun 2022												

Watansoppeng, Juli 2022

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
 DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. SOPPENG

KEPALA BIDANG ANGGARAN

Drs. H. DIPA, M.Si
 NIP. 19680102 199403 1 005

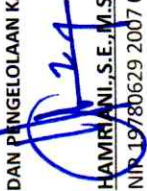
H. IRFAN, SE., M.M
 NIP. 19810505 200502 1 007

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON III
 KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN PENGELOLAAN KAS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
 TRIWULAN II TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	CARA PENGUKURAN INDIKATOR KEGIATAN	TRIWULAN II		KET	KEGIATAN	PAGU	TRIWULAN II		KET
					REALISASI FISIK	%				REALISASI KEUANGAN	%	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah	Persentase Keterpenuhan Sistem Penatausahaan dan Perbendaharaan Daerah yang Terproses dan Tervalidasi Sesuai Regulasi	100	Jumlah Dokumen SPJ keuangan yang diselesaikan Tepat waktu dibagi Jumlah Dokumen yang harus diselesaikan dikali 100%	100	100.00		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	128,654,500	51,894,000	40.34	
Faktor Pendorong : Pelaksanaan penatausahaan keuangan berjalan maksimal dengan menggunakan aplikasi keuangan serta verifikasi berjenjang												
Uraian Permasalahan : SIPD penatausahaan belum bisa dimaksimalkan penggunaannya dalam penatausahaan keuangan												
Rencana Tindak Lanjut : Memanfaatkan aplikasi Logos dalam hal penatausahaan keuangan sebagai salah satu sistem kontrol dan memudahkan pengelolaan dalam proses penatausahaan keuangan												

Watansoppeng, Juli 2022

KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN
 DAN PENGELOLAAN KAS


 HAMRIANI, S.E., M.Si
 NIP. 19780629 2007 01 2 006

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
 DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. SOPPENG


 Drs. H. DIPA, M.Si
 NIP. 19680102 199803 1 005

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON III
KEPALA BIDANG AKUNTANSI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
TRIWULAN II TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	CARA PENGUKURAN INDIKATOR KEGIATAN	TRIWULAN II		KET	KEGIATAN	PAGU	TRIWULAN II		KET
					REALISASI FISIK	%				REALISASI KEUANGAN	%	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah	Persentase Keterpenuhan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang tersusun dan Tervalidasi sesuai Regulasi	100	Jumlah Pelaporan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang tersusun dan tervalidasi dibagi Jumlah Pelaporan Akuntansi dikali 100%	100	100.00		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	356,130,000	56,327,300	15.82	
Faktor Pendorong : Adanya ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dalam tertib waktu penyusunan laporan keuangan												
Uraian Permasalahan : SIPD kemendagri untuk menu penatausahaan belum dapat dioptimalkan penggunaannya untuk pencatatan laporan keuangan (bulanan, triwulan, semester maupun tahunan)												
Rencana Tindak Lanjut : Memaksimalkan penggunaan aplikasi logos untuk mencatat transaksi keuangan												

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. SOPPENG

Drs. H. DIPA, M.Si

NIP. 19680102 199603 1 005

Watansoppeng, Juli 2022

KEPALA BIDANG AKUNTANSI

NUR AIDA, S.Sos., M.Si

NIP. 19691108 199009 2 002

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON III
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
TRIWULAN II TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	CARA PENGUKURAN INDIKATOR KEGIATAN	TRIWULAN II		KET	KEGIATAN	PAGU	TRIWULAN II		KET
					REALISASI FISIK	%				REALISASI KEUANGAN	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah	Persentase Keterpenuhan Barang Milik Daerah yang Teradministrasi Lengkap dan Tepat sesuai Regulasi	100	Jumlah SKPD yang melaksanakan pencatatan administrasi aset dengan baik dan benar dibagi dengan jumlah SKPD	100	98.00		Pengelolaan Barang Milik Daerah	1,207,450,000	212,284,380	17.58	
Faktor Pendorong : Ketersediaan anggaran dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan												
Uraian Permasalahan : Masih kekurangan biaya dalam pensertifikatan tanah milik daerah												
Rencana Tindak Lanjut : Memaksimalkan kerjasama dengan BPN serta pihak eksternal dalam mewujudkan manajemen aset yang teradministrasi dengan baik, dan adanya penambahan anggaran melalui pengeseran anggaran mendahului perub												

Watansoppeng, Juli 2022

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. SOPPENG


Drs. H. DIPA, M.Si
NIP. 19680102 199403 1 005

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH

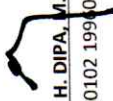

ASRI, S.E., M.M
NIP. 19751027 200901 1 006

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON III
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
TRIWULAN II TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	CARA PENGUKURAN INDIKATOR KEGIATAN	TRIWULAN II		KET	KEGIATAN	PAGU	TRIWULAN II		KET
					REALISASI FISIK	%				REALISASI KEUANGAN	%	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase Pendapatan Asli Daerah	100%	Persentase Pendapatan Asli Daerah	11,20%	11.20		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	1,141,027,743	371,159,533	32.53	
Faktor Pendorong : meningkatnya potensi pajak daerah												
Uraian Permasalahan : Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar tunggakan pajak daerah												
Rencana Tindak Lanjut : Mengoptimalkan kerjasama dengan mitra pajak dalam pengihan pajak daerah serta mensosialisasikan penggunaan pembayaran secara elektronik kepada masyarakat												

Watansoppeng, Juli 2022

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. SOPPENG


Drs. H. DIPA, M.Si
NIP. 19680102 199403 1 005

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH


JUMIAR, ST, MM
NIP : 19710612 200212 1 006



ESELON IV

PENGUKURAN
KINERJA
TRIWULAN II

TA. 2022

BPKPD

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN SOPPENG

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
TRIWULAN II TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	CARA PENGUKURAN INDIKATOR SUB KEGIATAN	TRIWULAN II			KET	SUB KEGIATAN	PAGU	TRIWULAN II		KET
					REALISASI FISIK	%	%				REALISASI KEUANGAN	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Meningkatnya Kapasitas Aparatur dan Kualitas Layanan Penyelenggaraan Urusan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng	Jumlah Idokumen kepegawaian yang tersusun	7	Jumlah dokumen kepegawaian yang tersusun	5	71		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	41,050,000	9,801,000		23.88	
		Jumlah Jenis Alat Listrik/ Penerangan Bangunan yang tersedia (jenis)	2	Jumlah Jenis Alat Listrik/ Penerangan Bangunan (jenis)	2	100		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27,933,250	26,263,250		94.02	
		Jumlah paket bahan logistik kantor (paket)	3	Jumlah paket bahan logistik kantor (paket)	3	100		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	143,565,000	50,715,000		35.33	
		Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia (paket)	3	Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia (paket)	3	100		Penyediaan Barang Ceatakan dan penggandaan	312,532,500	91,380,169		29.24	
		Jumlah paket bahan/ material yang disediakan	3	Jumlah paket bahan/ material yang disediakan	3	100		Penyediaan Bahan/ Material	168,764,970	74,525,500		44.16	
		Jumlah tamu yang terfasilitasi	600	Jumlah tamu yang terfasilitasi	300	50		Fasilitasi Kunjungan Tamu	20,425,000	5,445,000		26.66	
		Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kali)	280	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kali)	437	156		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	418,963,200	211,043,100		50.37	
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (unit)	12	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (unit)	12	100		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	337,530,000	336,783,000		99.78	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan (unit)	1	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan (unit)	1	100		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan (unit)	60,000,000	35,000,000		58.33	
		Jumlah Paket Pengiriman	80	Jumlah Paket Pengiriman	40	50		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,000,000	-		-	
Jumlah pembayaran jasa telepon, air, dan listrik (kali)	36	Jumlah pembayaran jasa telepon, air, dan listrik (kali)	18	50		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6,541,309,965	2,901,597,733		44.36			
Jumlah jasa pelayanan umum yang disediakan (jenis)	2	Jumlah jasa pelayanan umum yang disediakan (jenis)	2	100		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	519,800,000	225,135,680		43.31			
Jumlah kendaraan dinas yg dipelihara dan dibayarkan STNK (unit)	294	Jumlah kendaraan dinas yg dipelihara dan dibayarkan STNK (unit)	100	34		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	157,444,050	62,105,850		39.45			
Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	39	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	15	38		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19,050,000	4,650,000		24.41			
Luas gedung kantor yang dipelihara (meter persegi)	75	Luas gedung kantor yang dipelihara (meter persegi)	45	60		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	21,725,000	-		-			

Faktor Pendorong : Sumber daya manusia yang kapabel dalam melaksanakan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian

Uraian Permasalahan : Kenaikan tarif dasar listrik untuk daya 3000Va ke atas menyebabkan anggaran yang tersedia untuk penyediaan sumber daya listrik tidak mencukupi hingga akhir tahun anggaran 2022

Rencana Tindak Lanjut : menggunakan anggaran secara efektif dan efisien dan lebih mengutamakan pencapaian kinerja

SEKRETARIS

LIES UTINI, S.M.Si
NIP. : 19690825 199312 2 002

Wakil Bupati

NURDIALAM NUR, S.Sos., M.Si
NIP. : 197709142011012006

Wakil Bupati
Juli 2022

KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
KASUBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
TRIWULAN II TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	CARA PENGUKURAN INDIKATOR SUB KEGIATAN	TRIWULAN II		KET	SUB KEGIATAN	PAGU	TRIWULAN II		KET
					REALISASI FISIK	%				REALISASI KEUANGAN	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Kapasitas Aparatur dan Kualitas Layanan Penyelenggaraan Urusan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	7	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	4	57		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7,795,000	2,679,300	34.37	
		Jumlah Dokumen RKA yang Tersusun	1	Jumlah dokumen RKA yang tersusun	-	0		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	14,705,000	2,890,000	19.65	
		Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang Tersusun	1	Jumlah dokumen RKA Perubahan yang tersusun	-	0		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15,830,000	2,292,999	14.49	
		Jumlah Dokumen Evaluasi yang Tersusun	9	Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun	5	56		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11,800,000	3,769,100	31.94	
Faktor Pendorong : Adanya sarana prasarana pendukung penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan, kerjasama yang cukup baik di lingkup internal BPKPD maupun dengan SKPD lain dalam setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan												
Uraian Permasalahan : Aplikasi SIPD sangat mengikat dalam pemilihan standar harga, regulasi yang selalu berubah dan dimutakhirkan sewaktu-waktu, adanya perubahan kebijakan, serta waktu yang sangat kasip dengan jumlah penyusunan dokumen baik perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang hampir bersamaan, menjadi salah satu kesulitan untuk dapat maksimal dalam penyusunan dokumen laporan yang sebaik-baiknya												
Rencana Tindak Lanjut : Tetap berusaha mengikuti tahapan yang telah ditetapkan dan senantiasa menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran sehingga dapat menghasilkan laporan kinerja yang baik, tepat dan memuaskan												

SEKRETARIS,


LIES UTINI, S.E., M.Si
NIP : 19690825 199312 2 002

Watansoppeng, Juli 2022
KASUBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN


ANDI NUR UMAYAH, S.E., MM
NIP. 19811006 200901 2 008

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
KASUBAG KEUANGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
TRIWULAN II TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	CARA PENGUKURAN INDIKATOR SUB KEGIATAN	TRIWULAN II		KET	SUB KEGIATAN	PAGU	TRIWULAN II		KET
					REALISASI FISIK	%				REALISASI KEUANGAN	%	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya		Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	103	96		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13,407,616,956	4,433,112,443	33.06	
		jumlah SPM yang diverifikasi (SPM)	1200	jumlah SPM yang terverifikasi (SPM)	430	36		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	118,340,000	18,330,000	15.49	
1	Meningkatnya Kapasitas Aparatur dan Kualitas Layanan Penyelenggaraan Urusan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang disusun (Dokumen)	3	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang tersusun (Dokumen)	3	100		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	44,923,000	35,950,000	80.03	
Faktor Pendorong : Adanya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan												
Uraian Permasalahan : Aplikasi SIPD untuk penatausahaan belum dapat diaplikasikan secara menyeluruh, begitu pula dalam hal pelaporan keuangan. Sehingga masih mengoptimalkan penggunaan aplikasi lain dalam pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan keuangan.												
Rencana Tindak Lanjut : Tetap menggunakan aplikasi terintegrasi antara penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan apabila SIPD belum sepenuhnya dapat digunakan dalam tahapan tersebut. Memaksimalkan verifikasi pertanggungjawaban keuangan agar tidak menjadi temuan dan potensi pelanggaran pada bagian keuangan												

SEKRETARIS,


LIES UTINI, S.E., M.Si
NIP : 19690825 199312 2 002

Watansoppeng, Juli 2022
KASUBAG KEUANGAN

ANDI RAHAJU, S.E., M.M
NIP. 19810315 200801 2 022

ANALISIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH SELAKU SUB KOORD. SUBID EVALUASI ANGGARAN DAN DANA TRANSFER BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG

TRIWULAN II TAHUN 2022

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	CARA PENGUKURAN INDIKATOR SUB KEGIATAN	TRIWULAN II			KET	SUB KEGIATAN	PAGU	TRIWULAN II		KET
					REALISASI FISIK	%	REALISASI KEUANGAN				%		
												6	
1	Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Terverifikasi sesuai Pedoman Penyusunan RKA-SKPD	34	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Terverifikasi sesuai Pedoman Penyusunan RKA-SKPD	-	0.00		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	36,225,000	-	-		
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Terverifikasi sesuai Pedoman Penyusunan RKA-SKPD	34	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Terverifikasi sesuai Pedoman Penyusunan RKA-SKPD	34	100.00		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	43,225,000	-	-		
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang Terverifikasi dan Tervalidasi untuk Disahkan	34	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang Terverifikasi dan Tervalidasi untuk Disahkan	34	100.00		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	5,775,000	4,900,000	84.85		
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Terverifikasi dan Tervalidasi untuk Disahkan	34	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Terverifikasi dan Tervalidasi untuk Disahkan	-	0.00		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	5,950,000	-	-		
		Jumlah Dokumen SBU yang Tersusun dan Ditetapkan sebagai Biaya Masukan Pelaksanaan Kegiatan Daerah	1	Jumlah Dokumen SBU yang Tersusun dan Ditetapkan sebagai Biaya Masukan Pelaksanaan Kegiatan Daerah	-	0.00		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	18,905,000	-	-		
		Persentase Kelancaran Pelaksanaan Transaksi Pinjaman Pemerintah Daerah	100	Pelaksanaan Transaksi Pinjaman Pemerintah Daerah yang terbayarkan dibagi Seluruh Jumlah Transaksi Pinjaman yang seharusnya dikali 100%	50	75.00		Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	1,664,517,020	261,618,244	15.72	Anggaran Berubah Pada Pergeseran ke I	
		Persentase Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	100	Jumlah Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah dibagi Jumlah cicilan yang harus dibayar dikali 100%	-	0.00		Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	8,753,605,027	-	-		
Faktor Pendorong : Cukup tingginya kepatuhan SKPD dalam mengelola penganggaran melalui SIPD													
Uraian Permasalahan : Perhitungan biaya Pelaksanaan Transaksi Pinjaman Pemerintah Daerah berubah pada Pergeseran Mendahului Perubahan I													
Rencana Tindak Lanjut : Mengoptimalkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan penggunaan SIPD dalam penyusunan RKA-SKPD, DPA-SKPD dan SBU													

Watansoppeng, Juli 2022

ANALISIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH SELAKU SUB KOORD. SUBID EVALUASI ANGGARAN DAN DANA TRANSFER

MUH. RIDAWAN, S.Kom., M.M
NIP. 19750320 200901 1 004

KEPALA BIDANG ANGGARAN

H. IRFAN, S.EP.M.M
NIP. 19810503 200502 1 007

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
 KASUBID PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN BELANJA MODAL
 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
 TRIWULAN II TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	CARA PENGUKURAN INDIKATOR SUB KEGIATAN	TRIWULAN II		KET	SUB KEGIATAN	PAGU	TRIWULAN II		KET
					REALISASI FISIK	%				REALISASI KEUANGAN	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen KUA-PPAS Pokok yang Terverifikasi dan Sesuai Regulasi	1	Jumlah Dokumen KUA-PPAS Pokok yang Terverifikasi dan Sesuai Regulasi	-	0		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	24,050,000	-	-	
		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Terverifikasi dan Sesuai Regulasi	1	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Terverifikasi dan Sesuai Regulasi	-	0		Koordinasi dan Penyusunan perubahan KUA dan Perubahan PPAS	38,900,000	-	-	
Faktor Pendorong : Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan												
Uraian Permasalahan : Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran berdasarkan pada Tahapan Penyusunan KUA-PPAS yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021												
Rencana Tindak Lanjut : Mengoptimalkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan penggunaan SIPD dalam penyusunan KUA-PPAS												

KEPALA BIDANG ANGGARAN


 H. IRFAN, S.E., M.M.
 NIP. 198105052005021007

Watansoppeng, Juli 2022

KASUBID PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN
 BELANJA MODAL


 INDARYANI, S.Sos
 NIP. 197307262007012020

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
KASUBID PENGELOLAAN KAS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
TRIWULAN II TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	CARA PENGUKURAN INDIKATOR SUB KEGIATAN	TRIWULAN II		KET	SUB KEGIATAN	PAGU	TRIWULAN II		KET
					REALISASI FISIK	%				REALISASI KEUANGAN	%	
1	Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Kas dan Data Ketersediaan Transaksi Harian Daerah	4	Jumlah Dokumen Kas Daerah	6	7	8	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	10	11	12	13
1		Jumlah Dokumen SPD yang Diterbitkan untuk Diproses sesuai Rencana Anggaran Kas Daerah	4	Jumlah Dokumen Anggaran Kas dan SPD	4	100.00		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	16,783,000	4,160,000	24.79	
		Jumlah SKPD yang mengelola DAK sesuai Juknis dan Sistem	9	Jumlah SKPD Pengelola Dana DAK	2	50.00		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	16,860,000	7,825,000	46.41	Anggaran Berubah pada Pergeseran an I
					9	100.00			14,200,000	10,925,000	76.94	Anggaran Berubah pada Pergeseran an I

Faktor Pendorong : Adanya ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan, pengelolaan, pengendalian dan penerbitan anggaran kas

Uraian Permasalahan : Kurang cermatnya dalam mengelola pertanggungjawaban makan dan minum menyebabkan adanya pergeseran anggaran

Rencana Tindak Lanjut : Memaksimalkan pelayanan dalam pengelolaan kas daerah dan lebih mencermati anggaran kas setiap sub kegiatan

Watansoppeng, Juli 2022

KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN
DAN PENGELOLAAN KAS


HAMRIANI, S.E., M.Si
NIP. 19780629 200701 2 016

KASUBID PENGELOLAAN KAS

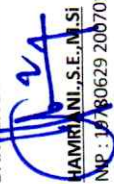

FAISAL H. QEWA, S.Kom., M.M
NIP. 19740624 200701 1 018

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
KASUBID PERBENDAHARAAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
TRIWULAN II TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	CARA PENGUKURAN INDIKATOR SUB KEGIATAN	TRIWULAN II		KET	SUB KEGIATAN	PAGU	TRIWULAN II		KET
					REALISASI FISIK	%				REALISASI KEUANGAN	%	
1	Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah	Jumlah Laporan	6	Jumlah Laporan	6	100	8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Penerimaan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	23,290,000	8,865,000	38.06	
		Jumlah Berita Acara atas pelaksanaan Rekonsiliasi	6	Jumlah Berita Acara atas pelaksanaan Rekonsiliasi	6	100		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Penerimaan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	25,355,000	10,294,000	40.60	
Faktor Pendorong : Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku												
Uraian Permasalahan : Aplikasi SIPD untuk penatausahaan belum bisa digunakan maksimal dalam pengelolaan keuangan, sehingga masih bergantung pada aplikasi logis dan manual												
Rencana Tindak Lanjut : Mengoptimalkan pelaksanaan rekonsiliasi antara SKPD terkait serta meningkatkan layanan perbendaharaan												

Watansoppeng, Juli 2022

KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN
DAN PENGELOLAAN KAS


HAMRIANI, S.E., M.Si
NIP. : 19780629 200701 2 016

KASUBID PERBENDAHARAAN


A. SRI WEDARI, SE
NIP. 19591014 199303 2 009

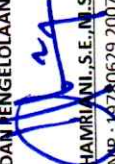
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
 ANALISIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH SELAKU SUB KOORD. SUBIB VERIFIKASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
 TRIWULAN II TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	CARA PENGUKURAN INDIKATOR SUB KEGIATAN	TRIWULAN II			KET	SUB KEGIATAN	PAGU	TRIWULAN II		KET
					REALISASI FISIK	%					REALISASI KEUANGAN	%	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah	Persentase Pengujian dan Penyelesaian Verifikasi SP2D yang Terproses Tepat Waktu	100	Jumlah SPM yang telah diverifikasi dan dapat diterbitkan SP2D nya dibagi jumlah SPM dikali 100%	100	100.00		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	32,166,500	9,825,000	30.54		
Faktor Pendorong : Adanya pedoman dalam melakukan verifikasi pertanggungjawaban keuangan													
Uraian Permasalahan : Aplikasi SIPD yang belum dapat digunakan secara maksimal dalam tahapan penatausahaan, mendorong penggunaan aplikasi lain dalam hal penatausahaan utamanya dalam penerbitan SP2D. Minimnya penggunaan kartu kendali menyebabkan over realisasi anggaran													
Rencana Tindak Lanjut : Mengoptimalkan penggunaan kartu kendali baik di tingkat SKPD maupun BUD agar tidak terjadi over realisasi anggaran													

Watansoppeng, Juli 2022

ANALISIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH SELAKU SUB KOORD. SUBIB VERIFIKASI

KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN
 DAN PENGELOLAAN KAS


 HAMRIANI, S.E., M.Si
 NIP. 19780629 200701 2 016


 IRWAN, S.E
 NIP. 19761110 200901 1 004

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
KASUBID AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
TRIWULAN II TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	CARA PENGUKURAN INDIKATOR SUB KEGIATAN	TRIWULAN II		KET	SUB KEGIATAN	PAGU	TRIWULAN II		KET
					REALISASI FISIK	%				REALISASI KEUANGAN	%	
1	Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Yang PSAP Akuntabel	4	Jumlah Laporan Keuangan Yang Akuntabel	6	7	8	9	10	11	12	13
1		Jumlah pelaksanaan sidang majelis	1	Jumlah pelaksanaan sidang majelis	1	100.00		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	34,750,000	11,557,700	33.26	
		Jumlah pelaksanaan sidang majelis	4	Jumlah pelaksanaan sidang majelis	4	100.00		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	55,070,000	-	-	
		Persentase Penyelesaian Kerugian Daerah	100	Jumlah kasus kerugian daerah melalui sidang TGR yang terselesaikan dibagi jumlah kasus sidang TGR dikali 100%	100	100.00						

Faktor Pendorong : Adanya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku

Uraian Permasalahan : Pelaksanaan pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas belum menggunakan aplikasi SIPD sehingga masih memaksimalkan penggunaan Aplikasi logas

Rencana Tindak Lanjut : Memaksimalkan penggunaan waktu yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan khususnya dalam pelaksanaan sidang MTGR

Watanoppeng, Juli 2022

KASUBID AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS



Kepala Bidang Akuntansi

NUR AIDA, S.Sos., M.Si

NIP. 19691108 199009 2 002

KASUBID AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS



ROHMAWATI, SE

NIP. 19770608 200212 2 002

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
 ANALISIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH SELAKU SUB KOORD. SUBID AKUNTANSI BARANG MILIK DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
 TRIWULAN II TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	CARA PENGUKURAN INDIKATOR SUB KEGIATAN	TRIWULAN II		KET	SUB KEGIATAN	PAGU	TRIWULAN II		KET
					REALISASI FISIK	%				REALISASI KEUANGAN	%	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD BLUD dan LKPD yang terkonsolidasi UN AUDIT	1	Jumlah Laporan Keuangan SKPD BLUD dan LKPD yang terkonsolidasi UN AUDIT	1	100.00		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	85,900,000	3,486,700	4.06	

Faktor Pendorong : Adanya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku

Uraian Permasalahan : Dalam penyusunan laporan keuangan SKPD adalah belum memahami sistem SAP berbasis akrual secara komprehensif, dalam hal ini terkait dengan kemampuan SDM, seperti informasi yang mengungkapkan kemungkinan adanya transaksi yang tidak patut (irregularities), transaksi yang menyimpang peraturan (illegal act) yang kemungkinan besar akan berdampak terhadap laporan keuangan

Rencana Tindak Lanjut : Perlu ditingkatkannya pelaksanaan Desk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) – menghitung kesesuaian nilai kas daerah dengan realisasi penerimaan dan realisasi belanja per Juli 2022, memastikan kemungkinan – kemungkinan yang terjadi terkait pengelolaan kas, Rekon dana BOS 2022, Rekon lanjutan data akuntansi mencakup piutang, persediaan, beban dibayar di muka, investasi dan kewajiban (kelompok utang). Desk kedua atas Piutang dan persediaan Desk akun kewajiban (utang jangka pendek, utang beban, pendapatan dibayar dimuka, utang jangka panjang) Rekon data aset tetap berwujud dan tidak berwujud (mencakup penyusutan dan amortisasi), Koordinasi penyelesaian temuan BPK atas LKPD tahun 2020. Desk Laporan Operasional (LO) dan Neraca, Desk Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Desk Analisis laporan keuangan SKPD dan Penyusunan draf Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) SKPD

KEPALA BIDANG AKUNTANSI

 NUR AIDA, S.Sos., M.Si
 NIP : 19691108 199009 2 002

Watansoppeng, Juli 2022
 ANALISIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
 SELAKU SUB KOORD. SUBID AKUNTANSI BARANG MILIK DAERAH

 ASISA, S.E
 NIP. 14780113 200803 2 001

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
 KASUBID PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
 TRIWULAN II TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	CARA PENGUKURAN INDIKATOR SUB KEGIATAN	TRIWULAN II		KET	SUB KEGIATAN	PAGU	TRIWULAN II		KET
					REALISASI FISIK	%				REALISASI KEUANGAN	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang Terverifikasi sesuai Regulasi	34	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang Terverifikasi sesuai Regulasi	34	100.00		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	45,950,000	13,795,100	30.02	
		Jumlah Laporan Realisasi Bulanan Triwulan dan Semsteran SKPD yang Terverifikasi sesuai Regulasi	612	Jumlah Laporan Realisasi Bulanan Triwulan dan Semsteran SKPD yang Terverifikasi sesuai Regulasi	306	50.00		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	30,765,000	10,237,800	33.28	
		Jumlah Ranperda dan Ranperbub Pertanggungjawaban APBD yang Terkonsolidasi dan Disetujui untuk Disahkan	2	Jumlah Ranperda dan Ranperbub Pertanggungjawaban APBD yang Terkonsolidasi dan Disetujui untuk Disahkan	-	0.00		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ kota	64,450,000	17,250,000	26.76	
		Tersusunnya Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1	Jumlah Sisdur Akuntansi dan Laporan Keuangan Daerah yang diterbitkan	-	0.00		Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	39,245,000	-	-	
Faktor Pendorong : Adanya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Uraian Permasalahan : Dalam penyusunan laporan keuangan SKPD adalah belum memahami sistem SAP berbasis akrual secara komprehensif, dalam hal ini terkait dengan kemampuan SDM, seperti informasi yang mengungkapkan kemungkinan adanya transaksi yang tidak patut (irregularities), transaksi yang menyimpang peraturan (illegal act) yang kemungkinan besar akan berdampak terhadap laporan keuangan Rencana Tindak Lanjut : Mempertahankan Karakteristik kualitas informasi keuangan pada LKPD yaitu relevan, andal, dapat diperbandingkan dan dapat dipahami serta mampu memberikan informasi keuangan sebagai dasar pengambilan kebijakan desentralisasi fiskal Pemerintah Daerah, baik dalam bidang perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian dan pengambilan keputusan.												

Watansoppeng, Juli 2022

KEPALA BIDANG AKUNTANSI

 NUR AIDA, S.Sos., M.Si
 NIP. : 19691108 199009 2 002

KASUBID PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

 HERMANI, SE, AK
 NIP. 19810528 200502 2 003

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
KASUBID ANALISIS KEBUTUHAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
TRIWULAN II TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	CARA PENGUKURAN INDIKATOR SUB KEGIATAN	TRIWULAN II		KET	SUB KEGIATAN	PAGU	TRIWULAN II		KET
					REALISASI FISIK	%				REALISASI KEUANGAN	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa yang Terkonsolidasi untuk Diterbitkan	2	Jumlah Buku Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa	1	50.00		Penyusunan Standar Harga	107,000,000	-	-	
Faktor Pendorong : Adanya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan adanya kerjasama dengan pihak penyedia terkait penyusunan Standar Harga, Standar Biaya Umum, HSPK dan ASB												
Uraian Permasalahan : Tidak dilakukannya pencetakan buku standar harga dan hanya membagikan soft copy ke masing-masing SKPD												
Rencana Tindak Lanjut : Meningkatkan akses pengecekan standar harga melalui aplikasi baik SIPD maupun aplikasi lainnya												

Watansoppeng, Juli 2022

KASUBID ANALISIS KEBUTUHAN

 HJ. ANITA MARYANA, S.Sos., M.Si
NIP. 19840921 201001 2 005

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH

 ASRI, S.E., M.M.
NIP : 19751027 200901 1 006

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
 ANALISIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH SELAKU SUB KOORD SUBID INVENTARISASI DAN PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH
 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
 TRIWULAN II TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	CARA PENGUKURAN INDIKATOR SUB KEGIATAN	TRIWULAN II		KET	SUB KEGIATAN	PAGU	TRIWULAN II		KET
					REALISASI FISIK	%				REALISASI KEUANGAN	%	
1	Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah	Jumlah Aset Pemda dan Titik Penjagaan	4	Jumlah Aset Pemda dan Titik Penjagaan	40	80.00	8	Pengamanan Barang Milik Daerah	688,190,000	181,347,280	26.35	Adanya perubahan anggaran pada Pergeseran I
		Ratio Pengamanan Barang Milik Daerah	100	Jumlah BMD yang telah memiliki bukti berkekuatan hukum dibandingkan dengan jumlah BMD dikali 100%	100	100.00						
		Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah yang Akuntabel, Transparan dan dapat Terkases dengan Baik	5	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah yang Akuntabel, Transparan dan dapat Terkases dengan Baik	3	60.00		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	104,520,000	16,092,000	15.40	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengadministrasian Barang Milik Daerah	34	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengadministrasian Barang Milik Daerah	34	100.00		Penatausahaan Barang Milik Daerah	36,425,000	3,850,000	10.57	
Faktor Pendorong : Adanya dukungan anggaran dalam pelaksanaan anggaran												
Uraian Permasalahan : Biaya belanja modal sertifikat tanah yang berdasarkan hitungan BPN sehingga agak sulit saat menaksir jumlah biaya keseluruhan yang dibutuhkan												
Rencana Tindak Lanjut : Melanjutkan pengamanan barang milik daerah dalam bentuk pensertifikatan dengan mengintensifkan koordinasi dengan Pihak BPN												

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
 BARANG MILIK DAERAH
ASRI
 ASRI,S.E.,M.M
 NIP : 19751027 200901 1 006

Watansoppeng, Juli 2022
 KASUBID INVENTARISASI DAN PENGAMANAN
 BARANG MILIK DAERAH

 FIKRAH SRIK
 NIP. 19840528 201503 1 001

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
 KASUBID PEMANFAATAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
 TRIWULAN II TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	CARA PENGUKURAN INDIKATOR SUB KEGIATAN	TRIWULAN II		KET	SUB KEGIATAN	PAGU	TRIWULAN II		KET
					REALISASI FISIK	%				REALISASI KEUANGAN	%	
1	Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Penilaian Aset Daerah yang Terkoreksi Kewajarannya	4	Jumlah Dokumen Penilaian Aset Daerah	6	7	8	9	10	11	12	13
			2			0.00		Penilaian Barang Milik Daerah	36,140,000			
1		Jumlah Dokumen Pencatatan Mutasi Barang Milik Daerah yang Terproses sesuai Regulasi	4	Jumlah Dokumen Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah.	1	25.00		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	70,100,000	10,995,100	15.68	
Faktor Pendorong : Adanya kecukupan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan												
Uraian Permasalahan : Nilai kontrak dari pihak ketiga/Apptraisal berdasarkan hasil penawaran												
Rencana Tindak Lanjut : Mengestimasi kebutuhan anggaran penilaian barang milik daerah lebih tepat pada perencanaan berikutnya												

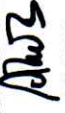
Watansoppeng,
 Juli 2022

KASUBID PEMANFAATAN DAN PENGHAPUSAN
 BARANG MILIK DAERAH



SRIWANA, S.E
 NIP. 19780811 200212 2 005

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
 BARANG MILIK DAERAH



ASRI, S.E., M.M
 NIP : 19751027 200901 1 006

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
 KASUBID PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN PAJAK, RETRIBUSI DAERAH DAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH
 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
 TRIWULAN II TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	CARA PENGUKURAN INDIKATOR SUB KEGIATAN	TRIWULAN II		KET	SUB KEGIATAN	PAGU	TRIWULAN II		KET
					REALISASI FISIK	%				REALISASI KEUANGAN	%	
1	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Regulasi Pengelolaan Pajak Daerah yang Terproses untuk Diterbitkan	4	Jumlah Dokumen Regulasi Pengelolaan Pajak Daerah yang Terproses untuk Diterbitkan	6	7	8	9	10	11	12	13
1		Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah	1	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah	1	100		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	69.875,000	19,399,200	27.76	
		Jumlah Wilayah yang Terkendalikan dan Diawasi dalam Penerimaan Pajak Daerah	1	Jumlah Wilayah yang Terkendalikan dan Diawasi dalam Penerimaan Pajak Daerah	1	100		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	55,550,000	15,400,000	27.72	Adanya Perubahan Anggaran pada Perserahan Tahun 2022
			8		8	100						

Faktor Pendorong : Adanya regulasi yang mnegatur tentang Pajak dan Retribusi daerah

Uraian Permasalahan : Alokasi anggaran untuk pemberian honor kepada tenaga ahli yang membantu terlaksananya pengawasan pajak daerah baru dialokasikan pada saat Pergeseran Anggaran I Tahun 2022

Rencana Tindak Lanjut : Mengupayakan penandatanganan pada awal tahun berjalan dan meningkatkan intensitas pengawasan pajak daerah

Watansoppeng, Juli 2022

KASUBID PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN PAJAK
 RETRIBUSI DAERAH DAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
 PENDAPATAN ASLI DAERAH

 JUMIAK, ST, MM
 NIP : 19710612 200212 1 006


 MUH. YUSUF, SE, M.M
 NIP. 19741131 199803 1 014

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
KASUBID PENETAPAN DAN PENGELOLAAN DATA PAJAK, RETRIBUSI DAERAH DAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
TRIWULAN II TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	CARA PENGUKURAN INDIKATOR SUB KEGIATAN	TRIWULAN II			KET	SUB KEGIATAN	PAGU	TRIWULAN II			KET
					REALISASI FISIK	%					REALISASI KEUANGAN	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	
1	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Jumlah Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi	8	Jumlah Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi	8	100		Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	309,102,743	6,846,083	2.21			
		Potensi Pajak Daerah	21.4	Potensi Pajak Daerah	21.4	100								
		Jumlah Dokumen Pemutakhiran Basis Data Bangunan Objek Pajak dan Retribusi	2	Jumlah Dokumen Pemutakhiran Basis Data Bangunan Objek Pajak dan Retribusi	2	100	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	319,450,000	252,648,800	79.09				
		Jumlah Jenis Objek Pajak dan Retribusi yang Dimutakhirkan	9	Jumlah Jenis Objek Pajak dan Retribusi yang Dimutakhirkan	9	100								
		Persentase Capaian Realisasi Retribusi Daerah	100%	Realisasi Pajak Daerah di Bagi Target Pajak Daerah dikali 100%	40%	40	Pembinaan dan pengawasan pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	4,900,000	4,208,750	85.89				
		Jumlah Peserta yang terafirmasi patuh dan taat pajak (laki-laki)	25	Jumlah Peserta yang terafirmasi patuh dan taat pajak (laki-laki)	25	100	Penyuluhan dan Penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah	23,670,000	23,120,000	97.68				
Jumlah Peserta yang terafirmasi patuh dan taat pajak (perempuan)	25	Jumlah Peserta yang terafirmasi patuh dan taat pajak (perempuan)	25	100										
		Jumlah wajib pajak yang sadar pajak	190000	Jumlah wajib pajak yang sadar pajak	190000	100								
Faktor Pendorong : Adanya regulasi yang mengatur tentang Pajak dan Retribusi daerah dan ketersediaan anggaran														
Uraian Permasalahan : Potensi Pajak Daerah yang masih sulit untuk digali potensinya menjadi target pajak daerah, terlambatnya proses pencetakan SPPT PBB														
Rencana Tindak Lanjut : Tetap mengintensifkan penerimaan pajak dan retribusi daerah dan memutakhirkan data pajak sesuai kondisi yang sebenarnya														

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH


JUMIAW, ST, MM
NIP : 19710612 200212 1 006

Watansoppeng, Juli 2022

KASUBID PENETAPAN DAN PENGELOLAAN DATA PAJAK
RETRIBUSI DAERAH DAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH


ANNA LISPASARI ANIS, SE, MM
NIP.19840311 201001 2 040

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
 KASUBID PENAGIHAN DAN PELAPORAN DATA PAJAK, RETRIBUSI DAERAH DAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH
 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
 TRIWULAN II TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	CARA PENGUKURAN INDIKATOR SUB KEGIATAN	TRIWULAN II		KET	SUB KEGIATAN	PAGU	TRIWULAN II		KET
					REALISASI FISIK	%				REALISASI KEUANGAN	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Jumlah SPPT yang Terdistribusi dengan Baik dan Lancar	203200	Jumlah SPPT yang Terdistribusi dengan Baik dan Lancar	100,000	49						
		Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Tepat Waktu	165000	Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Tepat Waktu	40,476	25		Penagihan Pajak Daerah	304,600,000	30,403,000	9.98	
Faktor Pendorong : Adanya regulasi yang mnegatur tentang Pajak dan Retribusi daerah, ketersediaan anggaran dan percepatan optimalisasi pajak daerah												
Uraian Permasalahan : Adanya pendemi covid-19 membatasi gerak petugas dalam melakukan penagihan												
Rencana Tindak Lanjut : Meningkatkan realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lain-pain yang sah melalui gerakan penagihan serta sosialisasi tentang cara pembayaran online												

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
 PENDAPATAN ASLI DAERAH


JUMIAK, ST, MM
 NIP : 19710612 200212 1 006

Watansoppeng, Juli 2022

KASUBID PENAGIHAN DAN PELAPORAN PAJAK
 RETRIBUSI DAERAH DAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH


SOFYANG, S.IP., MM
 NIP.19790603200701 1 018

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
KEPALA UPT PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH WILAYAH KECAMATAN LALABATA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
TRIWULAN II TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	CARA PENGUKURAN INDIKATOR SUB KEGIATAN	TRIWULAN II		KET	SUB KEGIATAN	PAGU	TRIWULAN II		KET
					REALISASI FISIK	%				REALISASI KEUANGAN	%	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Tepat Waktu	203200	Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Tepat Waktu	7569	4		Penagihan Pajak Daerah	16,010,000	3,080,000	19.24	
Faktor Pendorong : Adanya regulasi yang mengatur terkait pengelolaan Pajak dan Retribusi daerah												
Uraian Permasalahan : Masih perlu dilakukan sosialisasi terkait pungutan pajak daerah dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menyelesaikan tunggakan dan membayar pajak sebelum jatuh tempo												
Rencana Tindak Lanjut : Mengintensifkan pembayaran pajak online kepada masyarakat serta meningkatkan koordinasi dengan mitra pajak dalam peningkatan penerimaan PAD												

Watansoppeng, Juli 2022

KEPALA UPT PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
WILAYAH KECAMATAN LALABATA

LUKMAN S.E., M.M
NIP. 19750626 200003 1 003

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH

JUMAR, ST, MM
NIP : 19710612 200212 1 006

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
 KASUBAG TU UPT PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH WILAYAH KECAMATAN LALABATA
 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
 TRIWULAN II TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	CARA PENGUKURAN INDIKATOR SUB KEGIATAN	TRIWULAN II			KET	SUB KEGIATAN	PAGU	TRIWULAN II			KET
					REALISASI FISIK	%					REALISASI KEUANGAN	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Meningkatnya Kapasitas Aparatur dan Kualitas Layanan Penyelenggaraan Urusan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang Tersedia	2	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang harus disediakan dibagi dengan yang Tersedia	2	100		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1,515,000	490,000	32.34			
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Tersedia	2	Jumlah Paket Bahan/Material yang harus disediakan dibagin dengan yang Tersedia	2	100		Penyediaan Bahan/Material	10,000,000	10,000,000	100.00			
		Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	69	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dalam dan luar daerah yang telah dilaksanakan	-	0		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15,418,000	-	-			
Faktor Pendorong :														
Uraian Permasalahan sehingga Realisasi Keuangan dan Fisik tidak mencapai 85% :														
Rencana Tindak Lanjut :														

Watansoppeng,

Juli 2022

SEKRETARIS,

LIES UTINI, SE., M.Si

NIP. 19690825 199312 2 002

KASUBAG TU UPT PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

WILAYAH KECAMATAN LALABATA

ARYANTO, SE., MM

NIP. 19790918 200701 1 008

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
KEPALA UPT PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH WILAYAH KECAMATAN DONRI-DONRI
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
TRIWULAN II TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	CARA PENGUKURAN INDIKATOR SUB KEGIATAN	TRIWULAN II			KET	SUB KEGIATAN	PAGU	TRIWULAN II		KET
					REALISASI FISIK	%					REALISASI KEUANGAN	%	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Tepat Waktu	24377	Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Tepat Waktu	2.658	11			Penagihan Pajak Daerah	11.010,000	1.500,000	13.62	
Faktor Pendorong : Adanya regulasi yang mengatur terkait pengelolaan Pajak dan Retribusi daerah													
Uraian Permasalahan : Masih perlu dilakukan sosialisasi terkait pungutan pajak daerah dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menyelesaikan tunggakan dan membayar pajak sebelum jatuh tempo													
Rencana Tindak Lanjut : Mengintensifkan penagihan dan mensosialisasikan pembayaran pajak online kepada masyarakat serta meningkatkan koordinasi dengan mitra pajak dalam peningkatan penerimaan PAD													

Watansoppeng, Juli 2022

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH



JUMIAK, ST, MM
NIP : 19710612 200212 1 006

KEPALA UPT PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
WILAYAH KECAMATAN DONRI-DONRI



HERIYADI, S.Sos
NIP.19660509 199203 1 006

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
KASUBAG TU UPT PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH WILAYAH KECAMATAN DONRI-DONRI
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
TRIWULAN II TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	CARA PENGUKURAN INDIKATOR SUB KEGIATAN	TRIWULAN II			KET	SUB KEGIATAN	PAGU	TRIWULAN II			KET
					REALISASI FISIK	%					REALISASI KEUANGAN	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Meningkatnya Kapasitas Aparatur dan Kualitas Layanan Penyelenggaraan Urusan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang Tersedia	2	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang harus disediakan dibagi dengan yang Tersedia	2	100		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1,515,000	-	-			
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Tersedia	2	Jumlah Paket Bahan/Material yang harus disediakan dibagi dengan yang Tersedia	2	100		Penyediaan Bahan/Material	10,000,000	10,000,000	100.00			
		Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dalam dan luar daerah yang telah dilaksanakan	-	0		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9,128,000	-	-			
Faktor Pendorong : Adanya ketersediaan anggaran dalam mengelola kegiatan dan sub kegiatan														
Uraian Permasalahan : Kurangnya sarana prasarana layanan														
Rencana Tindak Lanjut : Menyediakan sarana layanan yang cukup memadai untuk para penerima layanan														

Watansoppeng, Juli 2022

SEKRETARIS,


LIES UTAMI SE., M.Si
NIP. 19690825 199312 2 002

KASUBAG TU UPT PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
WILAYAH KECAMATAN DONRI-DONRI


RUSDIANA, S.Sos
NIP. 19680601 200701 2 030

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
KEPALA UPT PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH WILAYAH KECAMATAN LILIRILAU
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
TRIWULAN II TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	CARA PENGUKURAN INDIKATOR SUB KEGIATAN	TRIWULAN II		KET	SUB KEGIATAN	PAGU	TRIWULAN II		KET
					REALISASI FISIK	%				REALISASI KEUANGAN	%	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Tepat Waktu	33331	Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Tepat Waktu	6.271	19		Penagihan Pajak Daerah	14,510,000	3,570,000	24.60	
Faktor Pendorong : Adanya regulasi yang mengatur terkait pengelolaan Pajak dan Retribusi daerah												
Uraian Permasalahan : Masih perlu dilakukan sosialisasi terkait pungutan pajak daerah dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menyelesaikan tunggakan dan membayar pajak sebelum jatuh tempo												
Rencana Tindak Lanjut : Mengintensifkan penagihan dan mensosialisasikan pembayaran pajak online kepada masyarakat serta meningkatkan koordinasi dengan mitra pajak dalam peningkatan penerimaan PAD												

Watansoppeng, Juli 2022

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH


JUMIAK, ST, MM
NIP : 19710612 200212 1 006

KEPALA UPT PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
WILAYAH KECAMATAN LILIRILAU


ILHAM DJUMAIDI, S.Sos.,M.M
NIP. 19760617 200604 1 022

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
 KASUBAG TU UPT PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH WILAYAH KECAMATAN LILIRILAU
 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
 TRIWULAN II TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	CARA PENGUKURAN INDIKATOR SUB KEGIATAN	TRIWULAN II			KET	SUB KEGIATAN	PAGU	TRIWULAN II			KET
					REALISASI FISIK	%					REALISASI KEUANGAN	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	
1	Meningkatnya Kapasitas Aparatur dan Kualitas Layanan Penyelenggaraan Urusan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang Tersedia	2	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang harus disediakan dibagi dengan yang Tersedia	2	100		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1,515,000		-	-		
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Tersedia	2	Jumlah Paket Bahan/Material yang harus disediakan dibagi dengan yang Tersedia	2	100		Penyediaan Bahan/Material	10,000,000	10,000,000	100.00			
		Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dalam dan luar daerah yang telah dilaksanakan	-	0		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12,528,800		-			
Faktor Pendorong : Adanya ketersediaan anggaran dalam mengelola kegiatan dan sub kegiatan														
Uraian Permasalahan : Kurangnya sarana prasarana layanan														
Rencana Tindak Lanjut : Menyediakan sarana layanan yang cukup memadai untuk para penerima layanan														

SEKRETARIS,


 LIES UTINI SE., M.Si
 NIP. 19690825 199312 2 002

Watansoppeng, Juli 2022

KASUBAG TU UPT PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 WILAYAH KECAMATAN LILIRILAU


 RUSLANG, SE
 NIP. 19661231 200701 1 168

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
KEPALA UPT PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH WILAYAH KECAMATAN LILIRIAJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
TRIWULAN II TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	CARA PENGUKURAN INDIKATOR SUB KEGIATAN	TRIWULAN II		KET	SUB KEGIATAN	PAGU	TRIWULAN II		KET
					REALISASI FISIK	%				REALISASI KEUANGAN	%	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Tepat Waktu	28216	Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Tepat Waktu	1583	6		Penagihan Pajak Daerah	12,510,000	2,266,950	18.12	
Faktor Pendorong : Adanya regulasi yang mengatur terkait pengelolaan Pajak dan Retribusi daerah												
Uraian Permasalahan : Masih perlu dilakukan sosialisasi terkait pungutan pajak daerah dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menyelesaikan tunggakan dan membayar pajak sebelum jatuh tempo												
Rencana Tindak Lanjut : Mengintensifkan pembayaran pajak online kepada masyarakat serta meningkatkan koordinasi dengan mitra pajak dalam peningkatan penerimaan PAD												

Watansoppeng, Juli 2022

KEPALA UPT PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
WILAYAH KECAMATAN LILIRIAJA


AGUS, SE

NIP. 197505052009011003

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH


JUMIAW, ST, MM

NIP : 19710612 200212 1 006

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
KASUBAG TU UPT PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH WILAYAH KECAMATAN LILIRAJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
TRIWULAN II TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	CARA PENGUKURAN INDIKATOR SUB KEGIATAN	TRIWULAN II			KET	SUB KEGIATAN	PAGU	TRIWULAN II		KET
					REALISASI FISIK	%					REALISASI KEUANGAN	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
1	Meningkatnya Kapasitas Aparatur dan Kualitas Layanan Penyelenggaraan Urusan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang Tersedia	2	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang harus disediakan dibagi dengan yang Tersedia	2	100		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1,515,000		-	-	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Tersedia	2	Jumlah Paket Bahan/Material yang harus disediakan dibagi dengan yang Tersedia	2	100		Penyediaan Bahan/Material	10,000,000	10,000,000	100.00		
		Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dalam dan luar daerah yang telah dilaksanakan	-	0		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10,658,000	-	-		
Faktor Pendorong : Adanya ketersediaan anggaran dalam mengelola kegiatan dan sub kegiatan													
Uraian Permasalahan : Kurangnya sarana prasarana layanan													
Rencana Tindak Lanjut : Menyediakan sarana layanan yang cukup memadai untuk para penerima layanan													

SEKRETARIS,


LIES UTINI, SE., M.Si
NIP. 19690825 199312 2 002

Watansoppeng, Juli 2022

KASUBAG TU UPT PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
WILAYAH KECAMATAN LILIRAJA


MUHRADI, S.Sos
NIP. 19790819 200801 1 008

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
 KEPALA UPT PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH WILAYAH KECAMATAN MARIORIAWA
 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
 TRIWULAN II TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	CARA PENGUKURAN INDIKATOR SUB KEGIATAN	TRIWULAN II		KET	SUB KEGIATAN	PAGU	TRIWULAN II		KET
					REALISASI FISIK	%				REALISASI KEUANGAN	%	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Tepat Waktu	25183	Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Tepat Waktu	7,328	29		Penagihan Pajak Daerah	11.510,000	1,750,000	15.20	
Faktor Pendorong : Adanya regulasi yang mengatur terkait pengelolaan Pajak dan Retribusi daerah												
Uraian Permasalahan : Masih perlu dilakukan sosialisasi terkait pungutan pajak daerah dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menyelesaikan tunggakan dan membayar pajak sebelum jatuh tempo												
Rencana Tindak Lanjut : Mengintensifkan pembayaran pajak online kepada masyarakat serta meningkatkan koordinasi dengan mitra pajak dalam peningkatan penerimaan PAD												

Watansoppeng, Juli 2022

KEPALA UPT PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 WILAYAH KECAMATAN MARIORIAWA



ANARUDDIN, SE,MM
 NIP.19671231 199003 1 072

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
 PENDAPATAN ASLI DAERAH



JUMIARI, ST, MM
 NIP : 19710612 200212 1 006

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
KASUBAG TU UPT PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH WILAYAH KECAMATAN MARIORIAWA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
TRIWULAN II TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	CARA PENGUKURAN INDIKATOR SUB KEGIATAN	TRIWULAN II			KET	SUB KEGIATAN	PAGU	TRIWULAN II		KET
					REALISASI FISIK	%	REALISASI KEUANGAN				%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
1	Meningkatnya Kapasitas Aparatur dan Kualitas Layanan Penyelenggaraan Urusan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang Tersedia	2	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang harus disediakan dibagi dengan yang Tersedia	2	100		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1,515,000		-	-	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Tersedia	2	Jumlah Paket Bahan/Material yang harus disediakan dibagi dengan yang Tersedia	2	100		Penyediaan Bahan/Material	10,000,000		-	-	
		Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dalam dan luar daerah yang telah dilaksanakan	-	0		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9,298,800		-	-	
Faktor Pendorong : Adanya ketersediaan anggaran dalam mengelola kegiatan dan sub kegiatan													
Uraian Permasalahan : Kurangnya sarana prasarana layanan													
Rencana Tindak Lanjut : Menyediakan sarana layanan yang cukup memadai untuk para penerima layanan													

SEKRETARIS,



LIES UTINI, SE., M.SI
NIP. 19690825 199312 2 002

Watansoppeng, Juli 2022

KASUBAG TU UPT PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
WILAYAH KECAMATAN MARIORIAWA



ANDI SURIANI, S.Sos., M.M
NIP.19761014 201001 2 010

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
KEPALA UPT PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH WILAYAH KECAMATAN MARIORIWAWO
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
TRIWULAN II TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	CARA PENGUKURAN INDIKATOR SUB KEGIATAN	TRIWULAN II		KET	SUB KEGIATAN	PAGU	TRIWULAN II		KET
					REALISASI FISIK	%				REALISASI KEUANGAN	%	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Tepat Waktu	42467	Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Tepat Waktu	8,124	19		Penagihan Pajak Daerah	15,010,000	3,099,250	20.65	
Faktor Pendorong : Adanya regulasi yang mengatur terkait pengelolaan Pajak dan Retribusi daerah												
Uraian Permasalahan : Masih perlu dilakukan sosialisasi terkait pungutan pajak daerah dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menyelesaikan tunggakan dan membayar pajak sebelum jatuh tempo												
Rencana Tindak Lanjut : Mengintensifkan pembayaran pajak online kepada masyarakat serta meningkatkan koordinasi dengan mitra pajak dalam peningkatan penerimaan PAD												

Watansoppeng, Juli 2022

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH


JUMIARI, ST, MIM
NIP : 19710612 200212 1 006

KEPALA UPT PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
WILAYAH KECAMATAN MARIORIWAWO


MULIANI, S.Pt
NIP.19760707 201001 2 009

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
KASUBAG TU UPT PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH WILAYAH KECAMATAN MARIORIWAWO
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
TRIWULAN II TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	CARA PENGUKURAN INDIKATOR SUB KEGIATAN	TRIWULAN II		KET	SUB KEGIATAN	PAGU	TRIWULAN II		KET
					REALISASI FISIK	%				REALISASI KEUANGAN	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Kapasitas Aparatur dan Kualitas Layanan Penyelenggaraan Urusan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang Tersedia	2	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang harus disediakan dibagi dengan yang Tersedia	2	100		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1,515,000	978,300	64.57	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Tersedia	2	Jumlah Paket Bahan/Material yang harus disediakan dibagi dengan yang Tersedia	2	100		Penyediaan Bahan/Material	10,000,000	10,000,000	100.00	
		Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	51	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dalam dan luar daerah yang telah dilaksanakan	-	0		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12,698,800	-	-	
Faktor Pendorong : Adanya ketersediaan anggaran dalam mengelola kegiatan dan sub kegiatan												
Uraian Permasalahan : Kurangnya sarana prasarana layanan												
Rencana Tindak Lanjut : Menyediakan sarana layanan yang cukup memadai untuk para penerima layanan												

SEKRETARIS,


LIES UTINI, SE., M.Si
NIP. 19690825 199312 2 002

Watansoppeng, Juli 2022

KASUBAG TU UPT PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
WILAYAH KECAMATAN MARIORIWAWO


TASNE, S.Kes
NIP. 1967 12 31 200701 1 163

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
KEPALA UPT PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH WILAYAH KECAMATAN GANRA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
TRIWULAN II TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	CARA PENGUKURAN INDIKATOR SUB KEGIATAN	TRIWULAN II		KET	SUB KEGIATAN	PAGU	TRIWULAN II		KET
					REALISASI FISIK	%				REALISASI KEUANGAN	%	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Tepat Waktu	15239	Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Tepat Waktu	6.943	46		Penagihan Pajak Daerah	10.510.000	2.572.500	24.48	
Faktor Pendorong : Adanya regulasi yang mengatur terkait pengelolaan Pajak dan Retribusi daerah												
Uraian Permasalahan : Masih perlu dilakukan sosialisasi terkait pungutan pajak daerah dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menyelesaikan tunggakan dan membayar pajak sebelum jatuh tempo												
Rencana Tindak Lanjut : Mengintensifkan penagihan dan mensosialisasikan pembayaran pajak online kepada masyarakat serta meningkatkan koordinasi dengan mitra pajak dalam peningkatan penerimaan PAD												

Watansoppeng, Juli 2022

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH


JUMIAH ST, MIM
NIP : 19710612 200212 1 006

KEPALA UPT PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
WILAYAH KECAMATAN GANRA


ARIS, S.Sos
NIP.19691231 199212 1 004

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
KASUBAG TU UPT PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH WILAYAH KECAMATAN GANRA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
TRIWULAN II TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	CARA PENGUKURAN INDIKATOR SUB KEGIATAN	TRIWULAN II			KET	SUB KEGIATAN	PAGU	TRIWULAN II			KET
					REALISASI FISIK		%				REALISASI KEUANGAN		%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	
1	Meningkatnya Kapasitas Aparatur dan Kualitas Layanan Penyelenggaraan Urusan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang Tersedia	2	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang harus disediakan dibagi dengan yang Tersedia	2	100		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1,515,000		-	-		
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Tersedia	2	Jumlah Paket Bahan/Material yang harus disediakan dibagin dengan yang Tersedia	2	100		Penyediaan Bahan/Material	10,000,000	10,000,000	100.00			
		Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dalam dan luar daerah yang telah dilaksanakan	-	0		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8,788,800	-	-			
Faktor Pendorong : Adanya ketersediaan anggaran dalam mengelola kegiatan dan sub kegiatan														
Uraian Permasalahan : Kurangnya sarana prasarana layanan														
Rencana Tindak Lanjut : Menyediakan sarana layanan yang cukup memadai untuk para penerima layanan														

Watansoppeng,

Juli 2022

SEKRETARIS,

LIES UTINI, SE., M.Si

NIP. 19690825 199312 2 002

KASUBAG TU UPT PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

WILAYAH KECAMATAN GANRA

ANDI WAHYUDDIN, S.IP

NIP. 19720112 201001 1 004

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
KEPALA UPT PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH WILAYAH KECAMATAN CITTA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
TRIWULAN II TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	CARA PENGUKURAN INDIKATOR SUB KEGIATAN	TRIWULAN II		KET	SUB KEGIATAN	PAGU	TRIWULAN II		KET
					REALISASI FISIK	%				REALISASI KEUANGAN	%	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Tepat Waktu	13287	Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Tepat Waktu	1	0		Penagihan Pajak Daerah	9,010,000	1,295,000	14.37	
Faktor Pendorong : Adanya regulasi yang mengatur terkait pengelolaan Pajak dan Retribusi daerah												
Uraian Permasalahan : Masih perlu dilakukan sosialisasi terkait pungutan pajak daerah dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menyelesaikan tunggakan dan membayar pajak sebelum jatuh tempo												
Rencana Tindak Lanjut : Mengintensifkan pembayaran pajak online kepada masyarakat serta meningkatkan koordinasi dengan mitra pajak dalam peningkatan penerimaan PAD												

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH

JUMIADI, ST, MM
NIP : 19710612 200212 1 006

Watansoppeng, Juli 2022

KEPALA UPT PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
WILAYAH KECAMATAN CITTA

FITRIADI, SE
NIP.19670210 200604 1 016

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
KASUBAG TU UPT PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH WILAYAH KECAMATAN CITTA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
TRIWULAN II TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	CARA PENGUKURAN INDIKATOR SUB KEGIATAN	TRIWULAN II			KET	SUB KEGIATAN	PAGU	TRIWULAN II			KET
					REALISASI FISIK	%					REALISASI KEUANGAN	%		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	
1	Meningkatnya Kapasitas Aparatur dan Kualitas Layanan Penyelenggaraan Urusan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang Tersedia	2	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang harus disediakan dibagi dengan yang Tersedia	2	100		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1,515,000		-	-		
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Tersedia	2	Jumlah Paket Bahan/Material yang harus disediakan dibagi dengan yang Tersedia	2	100		Penyediaan Bahan/Material	10,000,000	10,000,000	100.00			
		Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dalam dan luar daerah yang telah dilaksanakan	-	0		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7,088,800		-			
Faktor Pendorong : Adanya ketersediaan anggaran dalam mengelola kegiatan dan sub kegiatan														
Uraian Permasalahan : Kurangnya sarana prasarana layanan														
Rencana Tindak Lanjut : Menyediakan sarana layanan yang cukup memadai untuk para penerima layanan														

Watansoppeng, Juli 2022

KASUBAG TU UPT PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
WILAYAH KECAMATAN CITTA

SEKRETARIS,


LIES UTINI, SE., M.Si
NIP. 19690825 199312 2 002

MUKARRAB, S.IP

NIP. 198512082010011021